

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Peneliti lakukan tentang “Agenda Utang Neoliberal dalam Pendanaan Iklim”, peneliti menemukan bahwa fenomena perubahan iklim yang terjadi pada akhir abad 21 mejadi sebuah momentum baru bagi aktor-aktor neoliberal untuk menjajah kembali negara-negara dunia ketiga yang sangat beresiko terkena dampak dari perubahan iklim karena minimnya teknologi, sumber daya manusia dan kapabilitas keuangan untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim tersebut. Negara-negara dunia ketiga pada akhirnya harus dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama merugikan yaitu meminta bantuan pihak eksternal / asing dalam mitigasi iklim atau bertindak independen dalam menangani krisis iklim dengan hasil yang sangat tidak maksimal akibat dari segala keterbatasan yang dimiliki.

Ketidakmampuan negara-negara berkembang tersebut disuarakan oleh mereka ke dalam forum internasional yang pada akhirnya menghasilkan suatu rezim iklim internasional. Dalam perjalanannya, rezim iklim internasional tersebut memberikan solusi bersama yang dianggapnya sebagai “*common solution*” untuk menghadapi krisis iklim dengan sebuah konsesus yang mengharuskan negara-negara maju membantu negara-negara berkembang dalam melakukan mitigasi iklim. Salah satu manifestasi dari hal tersebut ialah program pendanaan iklim yang diberikan kepada negara-negara berkembang. Program pendanaan iklim yang dianggap oleh kelompok yang pro neoliberal sebagai bentuk “tanggung jawab” dari negara maju terhadap negara-negara berkembang atas jejak karbon historis justru berkenyataan sebaliknya.

Program pendanaan iklim tersebut bukanlah sebuah bentuk tanggung jawab seperti yang digaungkan oleh kaum neoliberal melainkan sebuah bentuk alat untuk melakukan penjajahan jenis baru bagi para negara-negara maju. Hal tersebut didasari beberapa fakta yang mengemukakan bahwa sebagian besar aliran dana program pendanaan iklim berasal dari skema utang yang diciptakan oleh aktor-aktor neoliberal

kepada negara berkembang melalui hegemonitasnya dan tidak sama sekali membawa dampak baik seperti yang dicita-citakan, melainkan membawa segudang dampak buruk. Skema utang iklim tersebut tidak sama sekali membawa manfaat seperti yang disampaikan oleh para ahli ekonomi neoliberal karena adanya sistem bunga dalam setiap instrumen utang yang dipinjamkan oleh aktor-aktor neoliberal baik itu negara maju ataupun lembaga keuangan internasional.

Dengan memegang prinsip “Tidak ada makan siang yang gratis”, peneliti memutuskan untuk meragukan semua cita-cita dan janji manis para aktor neoliberal ketika menawarkan pinjaman utang kepada negara-negara berkembang. Pinjaman utang tersebut tidak menciptakan sebuah kemajuan dalam pembangunan, melainkan menciptakan sebuah paradoks pembangunan yang merupakan anti-thesis dalam pembangunan nasional. Selain itu, utang yang diberikan oleh aktor neoliberal dan negara-negara maju / hegemon akan berakumulasi dan berpotensi menjebak negara-negara berkembang ke dalam sebuah krisis utang.

Negara-negara berkembang yang terlanjur bergantung pada instrumen utang rawan akan terkena krisis ekonomi karena tidak berdaulat secara ekonomi sehingga ekonominya akan mudah terguncang jika suatu waktu negara peminjam mengalami sebuah permasalahan atau mungkin melakukan manuver kebijakan seperti halnya US yang melakukan manuver kebijakan dengan menaikkan suku bunga melalui bank sentralnya yakni The Fed yang pada akhirnya membuat krisis utang regional di wilayah Amerika Latin yang saat itu semuanya merupakan negara-negara dunia ketiga.

Negara-negara berkembang yang terjebak utang akan menemui titik puncak krisis di mana mereka sudah tidak bisa membayar utangnya lagi (*default*) akibat perekonomian negaranya yang sudah terlalu hancur. Ketika negara-negara berkembang berada di ambang kebangkrutan, negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional yang didalangi oleh aktor neoliberal mengajukan sebuah solusi untuk menyelamatkan negara berkembang yang berada di ambang kebangkrutan tersebut seolah-olah bertindak sebagai penyelamat. Kendati demikian, solusi yang ditawarkan oleh negara maju dan lembaga keuangan internasional bukan benar-benar sebagai

solusi melainkan cara lain untuk memperkuat cengkramannya pada negara-negara berkembang. Adapun solusi yang ditawarkan oleh kelompok neoliberal kepada negara-negara berkembang dikenal sebagai “Penyesuaian Struktural” atau *Structural Adjustment*, dan isi dari solusi yang ditawarkan oleh kelompok neoliberal tersebut tidak memiliki perbedaan sama sekali secara garis besar yaitu deregulasi keuangan, liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, dan investasi asing yang semuanya bermuara pada penguasaan dan hegemoni negara-negara maju atas negara berkembang.

Dalam konteks pendanaan iklim, negara-negara maju memiliki kekuatan hegemoni yang signifikan dalam menentukan arah dan prioritas pendanaan iklim, sementara negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam skema utang yang merugikan. Perspektif kritis dari Robert Cox dan Antonio Gramsci memberikan wawasan tentang dinamika hegemoni dan peran ideologi dalam pendanaan iklim. Cox menyoroti bagaimana pendanaan iklim dapat digunakan oleh negara-negara maju untuk memperkuat kontrol dan dominasi mereka atas negara berkembang. Sementara itu, Gramsci menekankan pentingnya ideologi dan budaya dalam menjaga hegemoni kelompok elit dan menindas perlawanan.

Utang iklim dapat mengakibatkan ketergantungan eksternal, kerugian sumber daya, dan pengalihan sektor publik ke tangan aktor neoliberal. Selain itu, deforestasi yang tidak diperhatikan dan pengembangan sektor pertanian yang merusak lingkungan juga merupakan isu serius yang perlu ditangani.

Teori hegemoni yang dikemukakan Robert Cox memberikan wawasan penting dalam memahami proses hegemoni yang terjadi dalam bingkai pendanaan iklim. Dalam konteks ini, peran negara-negara atau kelompok dominan dalam membentuk agenda, kebijakan, dan alokasi sumber daya menjadi aspek sentral yang perlu diperhatikan. Namun, penting juga untuk mengakui upaya dan perjuangan yang terus muncul untuk mengatasi dominasi hegemoni dan mendorong agenda yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pendanaan iklim.

## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Teoritis

1. **Harus memiliki sikap kritis terhadap pengaruh neoliberalisme :** Mengembangkan pemahaman yang kritis terhadap ideologi neoliberalisme dan dampaknya terhadap pendanaan iklim. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana neoliberalisme dapat mempengaruhi kebijakan dan prioritas pendanaan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mempertimbangkan alternatif pendanaan :** Mendorong eksplorasi dan pengembangan alternatif pendanaan iklim yang lebih berpusat pada keadilan sosial dan lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai pendekatan seperti pajak karbon, pendanaan langsung melalui pajak sumber daya alam, atau pendanaan melalui partisipasi masyarakat dan sektor swasta yang bertanggung jawab.
3. **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas :** Menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendanaan iklim. Ini mencakup mengungkapkan sumber pendanaan, mekanisme pengalokasian dana, dan pemantauan terhadap penggunaan dana secara efektif dan sesuai dengan tujuan mitigasi dan adaptasi iklim.
4. **Memperkuat peran negara dalam regulasi :** Mengakui pentingnya peran negara sebagai regulator dalam pendanaan iklim dan mendorong penguatan peran tersebut. Hal ini melibatkan pengembangan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta regulasi yang memastikan penggunaan dana iklim yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
5. **Peningkatan kesadaran dan partisipasi publik :** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pendanaan iklim. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan kesadaran publik tentang isu-isu iklim, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan, serta membangun

mekanisme partisipasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

### 6.2.2 Saran Praktis

1. **Diversifikasi sumber pendanaan** : Mendorong pengambil kebijakan untuk mengembangkan berbagai sumber pendanaan iklim, seperti dana publik, pendanaan swasta, dana internasional, dan mekanisme keuangan inovatif. Diversifikasi sumber pendanaan dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan meningkatkan kesinambungan pendanaan.
2. **Memprioritaskan sektor-sektor vital** : Mengidentifikasi dan memberikan prioritas pada sektor-sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan memiliki dampak signifikan terhadap mitigasi dan adaptasi iklim. Ini dapat mencakup sektor pertanian, energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pemulihan ekosistem.
3. **Tingkatkan kapasitas institusi** : Menginvestasikan dalam peningkatan kapasitas institusi terkait pendanaan iklim, termasuk penguatan kemampuan administrasi, pengelolaan risiko, pemantauan dan evaluasi, serta mekanisme pengawasan. Hal ini akan memastikan penggunaan dana iklim yang efisien, efektif, dan akuntabel.
4. **Fokus pada proyek-proyek berkelanjutan** : Memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai melalui pendanaan iklim memiliki fokus jangka panjang dan berkelanjutan. Ini berarti mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek, serta memastikan keberlanjutan finansial setelah pendanaan awal.
5. **Melibatkan berbagai pemangku kepentingan** : Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam proses pengambilan

keputusan terkait pendanaan iklim. Keterlibatan mereka dapat membantu memastikan representasi yang adil, pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan lokal, serta mendukung implementasi yang berhasil dan berkelanjutan.